

**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR  
NELAYAN (STUDI KASUS MASYARAKAT LANGARA BAJO  
KABUPATEN KONawe KEPULAUAN SULTRA)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**SARMANTO  
10538 02192 11**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Nelayan (Studi Kasus Masyarakat Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sultra).

Nama : Sarmanto

Nim : 105380219211

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggung jawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Juni 2018

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

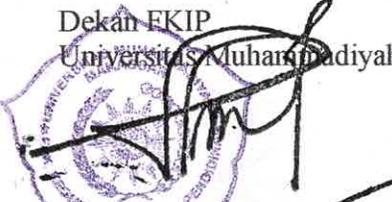
  
Dr. H. Muhsin Madani, M.Si

  
Drs. Hambali, S.Pd., M.Hum

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Erwin Alib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 554

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Sarmanto**, NIM 105380219211 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 049 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018.

19 Ramadhan 1439 H  
Makassar, -----  
04 Juni 2018 M

#### PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM ( )

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. ( )

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. ( )

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si. ( )

2. Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd. ( )

3. Dra. Hj. Syahribulan K, M.Pd. ( )

4. Dr. Munirah, M.Pd. ( )

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860.934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575.474



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarmanto

Nim : 105380219211

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul skripsi : Strategi PNPM Mandiri Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Nelayan (Studi Kasus Masyarakat Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sultra)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 Mei 2018

Yang Membuat Pernyataan

**Sarmanto**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

---

**SURAT PERJANJIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarmanto

Nim : 105380219211

Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya ( tidak dibuatkan oleh siapapun ).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 03 Mei 2018

Yang Membuat Pernyataan

**Sarmanto**

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

**Drs. H. Nurdin, M.Pd**  
**NBM : 575 474**

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jangan mendahulukan TUHAN dalam perkara apapun,  
kecuali TUHAN memberimu izin”.**

*“Menjadi apapun kita kedepannya tetap bersyukur,  
asal jangan menjadi TUHAN”.*

Kupersembahkan karya ini buat:

Kedua orang tuaku, saudara kandungku, keluargaku, dan sahabat/teman,

Atas keikhlasan dan doanya yang tak hentinya memohon kepada tuhan agar saya segera di  
wisudakan.

## **ABSTRAK**

**Sarmanto (105380219211). 2017. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Nelayan ( Studi Kasus Masyarakat Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan SULTRA)”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bawah bimbingan: Muhlis Madani, dan Hambali**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) di Desa Langara Bajo?, (2) Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo?. Tujuan penelitian ini adalah, (1) mendeskripsikan strategi PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo, (2) mendeskripsikan hambatan hambatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 9 orang terdiri dari 1 orang pengelola PNPM Mandiri-KP, 1 orang Tenaga Pendamping, dan 7 orang ketua kelompok masyarakat nelayan. Sumber data penelitian ini yaitu (1) informan utama yaitu pengelola PNPM Mandiri-KP dan para ketua kelompok nelayan, (2) informan pendukung yaitu dari tenaga pendamping kelompok PNPM Mandiri-KP. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi

melalui pengecekan sumber data. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo adalah dengan mengoptimalkan strategi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan dimana kelompok masyarakat nelayan berperan dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan akan iklim pemberdayaan, pelatihan SDM, memberikan rasa aman dalam konteks pelaksanaan program, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, pemberian sarana dan prasarana, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha dibidang perikanan dan kelautan, (2) Hambatan strategi PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo adalah pada pengembangan modal usaha untuk produksi hasil perikanan bagi masyarakat nelayan yang berdampak pada pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan hasil penelitian diberikan saran : (1) pemerintah harus memberi dukungan yang komprehensif dalam PNPM Mandiri-KP, (2) peningkatan kemitraan antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan masyarakat untuk meningkatkan usaha para nelayan agar mampu menciptakan kesejahteraan dikalangan nelayan miskin.

**Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Nelayan**

## KATA PENGANTAR



Allah maha penyayang dan pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan henti bertahmid atas anugerah pada detik waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu, sang khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati. Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya dan upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala rasa hormat penulis mengucapkan terimah kasih kepada kedua orang tua Lampiolu dan Wa Saba yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan kepada para keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan candaannya. Kepada Dr. H. Muklis Madani, M.Si dan Drs. Hambali, S.Pd.,M.Hum, sebagai pembimbing I dan

pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesai skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada; Dr. H. Abd Rahman Rahim., S.E.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Dr. H. Nursalam, M.Si., Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Karyati La Manda yang selama ini ikhlas menemani penulis, teman-teman Permamo Raya-Makassar yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka, sahabat-sahabat terkasih teman-teman P2k SMP Negeri 13 Bontoa Kabupaten Maros.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin

Makassar, Juli 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>KARTU KONTROL .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERJANJIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP</b>	
A. Kajian Pustaka .....	8

1. Penelitian Relevan .....	8
2. Pemberdayaan Masyarakat .....	11
3. Nelayan .....	26
4. PNPM Mandiri .....	29
B. Kerangka Konsep .....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	51
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Informan Penelitian .....	52
D. Fokus Penelitian .....	52
E. Instrument Penelitian .....	53
F. Jenis dan Sumber Data .....	53
G. Teknik Pengumpulan Data .....	53
H. Teknik Analisis Data .....	55
I. Teknik Keabsahan Data .....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1. Keadaan Geografis .....	59
2. Batas Wilayah Desa Langara Bajo .....	59
3. Keadaan Demografi.....	59
B. Hasil Penelitian.....	64
1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	64
2. Hambatan-Hambatan PNPM Mandiri-KP.....	68

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DOKUMENTASI**

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep .....	48

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator Keberdayaan .....	17
Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin .....	61
Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	62
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	63

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terkenal *memiliki* potensi kelautan dan pesisir yang kaya. Hal ini sesuai dengan sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), yang memiliki 17.508 gugusan pulau-pulau. Potensi sumberdaya pesisir di Indonesia dapat digolongkan sebagai kekayaan alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan berbagai macam jasa lingkungan (*environmental service*).

Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut, hampir semua provinsi di Indonesia memiliki perairan laut. Artinya, pasti ada daerah pesisir yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Sayangnya, dengan potensi kelautan yang besar itu, tidak ada sistem pengelolaan yang terpadu berkenaan dengan sumberdaya laut dan sumberdaya masyarakat pesisir di Indonesia. Sistem yang ada hanya sistem pengelolaan sentralistik yang hanya memungkinkan penguasaan sumberdaya laut di Indonesia oleh nelayan maupun masyarakat pesisir dengan kekuatan modal yang besar. Pada awalnya, pengelolaan semacam ini dimulai sejak masa kolonial belanda setelah itu, diikuti oleh rezim Orde Baru dan Orde Lama (Satria, 2013).

Pembangunan daerah pesisir kelautan selama tiga dasawarsa terakhir selalu diposisikan sebagai sektor pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini bidang kelautan yang didefenisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri

maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan serta masyarakat pesisir bukan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi sangat ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni lautan Pasifik dan Lautan Hindia - kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik di dunia. Sehingga secara ekonomis dan politis sangat logis jika bidang kelautan dan masyarakat pesisir dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional (Kusumastanto, 2015).

Implikasi dari tidak adanya prioritas kebijakan pembangunan perikanan tersebut, mengakibatkan sangat minimnya prasarana perikanan di wilayah pesisir, terjadinya abrasi wilayah pesisir dan pantai, pengrusakan ekosistem laut dan terumbu karang, serta belum teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.

Masyarakat nelayan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Pada umumnya mereka adalah kelompok masyarakat tertinggal yang berada pada level paling bawah, baik tertinggal secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai nelayan tradisional bukan saja berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi mereka juga dihadapkan manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksinya.

Sementara, ketertinggalan dalam strategi pengembangan masyarakat

pesisir, tidak hanya dilihat sebagai masalah sosial dan budaya sehingga perlu perubahan yang direncanakan dalam sistem sosial atau nilai-nilai budaya, melainkan lebih sebagai masalah yang serius. Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu dilakukan melalui strategi yang komprehensif dengan menempatkan sistem sosial-ekonomi dan nilai budaya yang sudah melekat didalam masyarakat sebagai faktor pendorong perubahan. Selain itu, peningkatan produktivitas masyarakat pesisir lebih menjadi sasaran dalam proses pembangunan guna memajukan kesejahteraan serta menyongsong kemandirian daerah secara berkelanjutan. Perkembangan ini pada muaranya akan meningkatkan harkat sumber daya manusia, kualitas dan sistem atau pranata sosial masyarakat.

Tidak ada kata terlambat bagi pemerintah Indonesia dalam merencanakan sekaligus mengimplementasikan kebijakan publik yang terkait dengan masalah pesisir dan kelautan. Meskipun baru dimulai, adanya perubahan arah pembangunan ke sektor kelautan, merupakan angin segar bagi masyarakat pesisir yang selama ini kurang tersentuh dan seakan dianak tirikan dibandingkan wilayah ataupun sektor lainnya. Meskipun diakui, masuknya revolusi biru selama ini telah mengakibatkan banyak perubahan positif bagi kehidupan masyarakat nelayan. Meningkatnya jumlah tangkapan ikan, membaiknya sistem bagi hasil dibanding sebelumnya dan telah meningkatkan pendapatan nelayan serta perubahan-perubahan dalam hubungan kerja antara ponggawa dan sawi. Namun kondisi masyarakat pesisir pada umumnya masih jauh tertinggal, baik dari tingkat pendapatan maupun dari tingkat pendidikan. Kondisi ini sangat menyulitkan dalam proses

transformasi struktural masyarakat pesisir (nelayan) kearah kondisi yang lebih baik (Haryono, 2012).

Beberapa studi memperlihatkan bahwa di kalangan masyarakat nelayan telah berkembang berbagai strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup, di antaranya adalah adanya pranata-pranata tradisional sebagai tindakan kolektif yang secara efektif dapat dipakai sebagai strategi untuk mengatasi kesulitan hidup, seperti pembentukan kelompok simpan pinjam dan arisan. Aktivitas ini sangat sederhana, fleksibel, dan adaptif terhadap kondisi-kondisi sosial-ekonomi, serta sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan, terutama yang kurang mampu (Sulistyo dan Rejeki, 2013; Kusnadi, 2014). Strategi lain adalah dengan melakukan diversifikasi pekerjaan, baik pekerjaan-pekerjaan yang masih berkait dengan kegiatan kenelayanan atau pencarian ikan di laut, maupun kegiatan di luar sektor kenelayanan, seperti bertani, berkebun, penjual jasa, tukang becak (Haryono, 2012).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusahameningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam untuk mengetahui “Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir nelayan di Kelurahan Langara Bajo. Dimana sebagian besar dari mereka termasuk nelayan tradisional dengan

tingkat pendidikan yang relatif rendah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti sejauh manakah pemberdayaan masyarakat di pesisir pantai di dalam pembangunan. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Strategi PNPM Mandiri-KP Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Nelayan di Desa Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sultra.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) di Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) di Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan strategi PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dideskripsikan secara teoritis mengenai strategi pemberdayaan masyarakat pesisir pantai dalam pembangunan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti tentang pemberdayaan masyarakat nelayan yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan, dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.
2. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (on-going) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan dan tidak hanya terpaku suatu program saja.
3. Nelayan adalah sekelompok orang yang mencari kehidupan di laut.
4. PNPM Mandiri –KP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

5. Teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju).
6. Teori Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan.'

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Penelitian Relevan

Upaya pemberdayaan masyarakat suku Bajo senantiasa menjadi topik perbincangan yang menarik perhatian banyak kalangan. Gagasan tersebut terbentuk bukan hanya karena masyarakat suku Bajo sebagai bagian dari masyarakat pesisir, umumnya hidup sebagai nelayan tradisional dan sangat rentan dengan kemiskinan, memiliki akses yang terbatas terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir di wilayahnya, bahkan senantiasa tereksplorasi oleh pihak-pihak di luar kawasan pesisir (Ali Basri, 2003, 2005; Anwar 2004, 2007). Tetapi juga, karena masyarakat yang biasa dijuluki sebagai orang laut atau manusia air tersebut memiliki suatu investasi sosial yang dapat dikonstruksi sebagai suatu katalis yang dapat mengantarkan orang Bajo menuju ketahanan sosial budaya dan ekonomi. Investasi sosial yang dimaksud adalah nilai-nilai kearifan lokal.

Sesuai dengan dasar teoritis penelitian ini yang memandang masyarakat suku Bajo sebagai *teks* dan memposisikan keseluruhan *teks* yang ada sebagai sumber data yang di dalamnya terdapat data penelitian yang akan diolah dan dianalisis, kajian atas hasil-hasil penelitian tentang masyarakat pesisir lainnya, terlebih dulu perlu dilakukan.

Beberapa penelitian tentang masyarakat suku Bajo di antaranya adalah "*Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pelatihan*

*Keterampilan Budidaya Ikan Laut dalam Keramba (Kaji Tindak pada Masyarakat Suku Bajo di Kecamatan Soropia Kabupaten Kendari)*” oleh Anwar (2004); *“Pemberdayaan Perempuan Nelayan Bajo: Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill”* oleh Anwar (2007); *“Orang Bajo di Desa Bungin Permai : Dinamika Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Penghuni Laut”* oleh Ali Basri (2003); *“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sistem Mata Pencaharian Orang Bajo di Desa Bungin Permai”* oleh Ali Basri (2005); *“Perubahan Pola Hidup Orang Bajo di Desa Bungin Permai dari Nomaden di Laut Menjadi Menetap di Laut”* oleh Ali Basri (2006).

Hasil penelitian Anwar (2004) tentang pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pelatihan budidaya ikan laut dalam keramba dengan fokus kajian pada masyarakat suku Bajo merupakan laporan hasil penelitian pada Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo Kendari. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan tentang budaya dan etos kerja yang tinggi, kemampuan kerjasama yang baik dan sikap *reciprocity* orang Bajo. Hasil penelitian Anwar (2007) tentang pemberdayaan perempuan nelayan Bajo, yang semula merupakan disertasi S3 pada Program Doktor Pendidikan Luar Sekolah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), namun kemudian diterbitkan dalam bentuk buku sejak tahun 2005 dan dicetak kembali 2007, merupakan hasil penelitian dan pengembangan terhadap perempuan suku Bajo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan vokasi mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan produktif dan kesadaran berwirausaha perempuan nelayan Bajo. Dalam

hasil penelitian itu juga dinyatakan bahwa sebenarnya masyarakat suku Bajo telah memiliki dasar-dasar pengetahuan vokasional yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka dan juga diperoleh dari hasil belajar mereka dengan lingkungan laut.

Hasil penelitian Anwar (2004 dan 2007) di atas, semakin memperjelas keaslian atau pentingnya penelitian ini bahwa masyarakat suku Bajo memiliki kearifan lokal yang belum dikembangkan secara optimal dan belum dikaji secara mendalam melalui kajian-kajian ilmiah. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut oleh penelitian ini dijadikan sebagai petunjuk awal bahwa rujukan untuk mengkaji lebih dalam kearifan-kearifan lokal masyarakat suku Bajo yang diwarisi secara turun-temurun baik dari ajaran nenek moyang, maupun dari hasil pengalaman hidup mereka berinteraksi dengan alam.

Hasil penelitian Ali Basri yang berjudul “Orang Bajo di Desa Bungin Permai : Dinamika Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Penghuni Laut” merupakan penelitian sebagai tesis S2 pada Program Magister Ilmu Sosial Universitas Padjajaran. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan orang Bajo merupakan komunitas masyarakat yang berbudaya laut secara alami telah menyatukan dirinya dengan kehidupan di laut. Mereka berpandangan bahwa laut adalah kehidupan, laut adalah kebun sekaligus pekarangan atau halaman rumah mereka. Orang Bajo berkeyakinan bahwa mereka berasal dari laut, hidup di laut, dan sebagai penguasa laut yang dapat memberikan rejeki, kebaikan, kesehatan dan melindungi manusia dari bencana.

Secara konseptual temuan Ali Basri (2003) di atas, oleh rencana penelitian ini dipandang sebagai rujukan bahwa masyarakat suku Bajo merupakan salah satu bagian masyarakat adat yang telah memiliki identitas budaya tersendiri yakni budaya laut dan membangun kehidupannya dengan ciri khas budaya laut pula. Masyarakat adat atau masyarakat asli umumnya memiliki seperangkat nilai, adat-istiadat, aturan-aturan dan pengetahuan-pengetahuan lainnya, yang senantiasa berpegang teguh bahkan menjadi pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Keterpinggiran masyarakat suku Bajo yang juga merupakan bagian dari masyarakat asli/adat yang bermukim di perairan laut dapat dilihat dari hasil penelitian Ali Basri (2005 dan 2006) bahwa masyarakat suku Bajo sebagai komponen masyarakat pesisir merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan didera kemiskinan. Keterhimpitan ekonomi mendorong masyarakat suku Bajo untuk melakukan diversifikasi pekerjaan, membangun jaringan sosial dengan memobilisasi tenaga ibu-ibu atau istri dan anak-anak mereka untuk melaut bersama suami sebagai salah satu strategi bertahan hidup.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Pengertian Masyarakat**

Dalam buku Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial karangan (Abdul Syani, 1987), dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan

saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Dalam bahasa Inggris kata masyarakat menjadi dua pengertian, yaitu *society* dan *community*. *Community* menurut Arthur Hillman (1951) adalah: “A definition of community must be inclusive enough to take account of the variety of both physical and social forms which community take”. Dapat diartikan bahwa masyarakat sebagai *community* cukup memperhitungkan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan kehidupan bersama (antar manusia) dan lingkungan alam. Jadi ciri dari *community* ditekankan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau sentimen. *Community* ini oleh Hassan Shadily (1983) disebut sebagai paguyuban yang memperlihatkan rasa sentimen yang sama seperti terdapat dalam *Ghemeninschaft*. Anggota-anggotanya mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan dan sentimen (faktor primer), kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas (faktor sekunder).

Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Hassan Shadily mengatakan bahwa masyarakat dapat didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia,

yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Kita dapat pula mengikuti definisi masyarakat menurut Ralph Linton yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Abdul Syani, 2012).

b. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” atau “power” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari kemampuan tersebut pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,

berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2013).

Dalam Jurnal Internasional, Pemberdayaan adalah :

*“The concept of empowerment has been developed and employed in a wide array of definitions in social-science research. Zimmerman (1995) distinguishes between empowering process and empowered outcomes. The first refers to how people, organizations, and communities become empowered, and the latter refers to the consequences of those processes. The concept of empowerment is applicable for those who lacks power or those whose potential is not fully developed in improving the quality-of-life, including urban poor. This concept encourages the poor to reacquire the power and control over their own lives (Friedmann, 1992).*

Dapat di artikan sebagai berikut konsep pemberdayaan telah dikembangkan dan digunakan dalam beragam definisi dalam penelitian sosial-sains. Zimmerman (1995) membedakan antara proses pemberdayaan dan hasil diberdayakan. Yang pertama merujuk kepada bagaimana orang-orang, organisasi, dan masyarakat menjadi berdaya, dan yang terakhir mengacu pada konsekuensi dari proses-proses tersebut. Konsep pemberdayaan berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau mereka yang potensial belum sepenuhnya dikembangkan dalam meningkatkan kualitas-of-kehidupan, termasuk miskin perkotaan. Konsep ini mendorong masyarakat miskin untuk reacquire kekuasaan dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri (Friedmann, 1992). (<http://lafadl.wordpress.com/2006/11/20/empowerment-and->

urbanpovertyalleviation-in-indonesia/ di download pada tanggal 23 juli 2017 Pukul 10.00 WITA).

Upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (on-going) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja (Isbandi, 2012).

Pada hakekatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (enabling). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan kognitif, konatif, psikomotor dan afektif dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat (Sulistiyani, 2012). Bertolak dari pendapat di atas, maka pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses partisipasi masyarakat dalam perubahan sosial melalui program pemberdayaan yang mempunyai kemampuan berfikir mandiri, mengetahui potensi diri, dan segala aspeknya serta dapat memecahkan

masalah dengan daya kemampuan kognitif, konatif, psikomotor, dan afektif sebagai satu kesatuan yang utuh.

c. Indikator Keberdayaan

Menurut Kieffer (1981) dalam Suharto (2013), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Parsons et.al. (1994:106) dalam Suharto (2013) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang berdaya atau tidak.

Tabel 2.1 indikator keberdayaan:

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam: Meningkatkan Kesadaran dan keinginan untuk berubah	<input type="checkbox"/> Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya <input type="checkbox"/> Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara <input type="checkbox"/> Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat	<input type="checkbox"/> Kepercayaan diri dan kebahagiaan <input type="checkbox"/> Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara <input type="checkbox"/> Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain <input type="checkbox"/> Keinginan untuk mengontrol jumlah anak	<input type="checkbox"/> Assertiveness dan otonomi <input type="checkbox"/> Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik <input type="checkbox"/> Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum

			dan politik
<p>Kekuasaan untuk: Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; Meningkatkan</p>	<p><input type="checkbox"/> Akses terhadap pelayanan keuangan mikro</p> <p><input type="checkbox"/> Akses terhadap pendapatan</p> <p><input type="checkbox"/> Akses terhadap asset-aset produktif dan</p>	<p><input type="checkbox"/> Keterampilan, termasuk kemelekan huruf</p> <p><input type="checkbox"/> Status kesehatan dan gizi</p> <p><input type="checkbox"/> Kesadaran mengenai dan</p>	<p><input type="checkbox"/> Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah</p> <p><input type="checkbox"/> Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan</p>
<p>kesempatan untuk memperoleh akses</p>	<p>kepemilikan rumahtangga</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak</p>	<p>akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi</p> <p><input type="checkbox"/> Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik</p>	<p>menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan</p>

<p>Kekuasaan atas: Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut</p>	<p><input type="checkbox"/> Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga</p> <p><input type="checkbox"/> Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga</p> <p><input type="checkbox"/> Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar</p>	<p><input type="checkbox"/> Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana</p> <p><input type="checkbox"/> Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat</p>	<p><input type="checkbox"/> Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat</p> <p><input type="checkbox"/> Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik</p>
<p>Kekuasaan dengan: Meningkatnya</p>	<p><input type="checkbox"/> Bertindak sebagai model peranan bagi</p>	<p><input type="checkbox"/> Penghargaan tinggi terhadap</p>	<p><input type="checkbox"/> Peningkatan jaringan untuk</p>

<p>solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan- hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumahtangga, masyarakat dan makro</p>	<p>orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern <input type="checkbox"/> Mampu memberi gaji terhadap orang lain <input type="checkbox"/> Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro</p>	<p>dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga <input type="checkbox"/> Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik</p>	<p>memperoleh dukungan pada saat krisis <input type="checkbox"/> Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat <input type="checkbox"/> Partisipasi dalam gerakan- gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro</p>
--	---	---	--

Sumber: Edi Suharto (2014).

d. Strategi Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto (2013) proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif dan tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Menurut Edi Suharto (2013) pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment): mikro, mezzo, dan makro.

a. Aras mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).

b. Aras mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam peningkatan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c. Aras makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Hal ini sependapat dengan Guiterrez dalam jurnal internasional mengatakan bahwa: „*Gutierrez (2010) argues that there are three perspectives on empowerment. First, a macro level perspective defines empowerment as the process of increasing collective political power. Second, a micro level perspective defines empowerment as the development of an individual feeling of increased power or control without an actual change in structural arrangements. Third, an approach combining the first and second perspectives: “how individual*

*empowerment can contribute to group empowerment and how the increase in a group's power can enhance the functioning of its individual member" (Gutierrez, 2010).*

Dapat diartikan sebagai berikut : Gutierrez (2012) berpendapat bahwa ada tiga perspektif pemberdayaan. Pertama, perspektif tingkat makro mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kekuatan politik kolektif. Kedua, perspektif tingkat mikro mendefinisikan pemberdayaan sebagai pengembangan perasaan individu daya yang meningkat atau kontrol tanpa perubahan yang sebenarnya dalam pengaturan struktural. Ketiga, pendekatan yang menggabungkan perspektif pertama dan kedua: "bagaimana pemberdayaan individu dapat berkontribusi untuk pemberdayaan kelompok dan bagaimana peningkatan kekuatan kelompok dapat meningkatkan fungsi anggota individu" (Gutierrez, 2010).(<http://lafadl.wordpress.com/2006/11/20/empowerment-and-urbapoverty-alleviation-in-indonesia/> di download pada tanggal 23 Juli 2017 jam 10.00 wita).

Harry Hikmat (2012) mengatakan ada tiga strategi utama pemberdayaan, yaitu *tradisional*, *direction* (aksi langsung), dan transformasi. (a) strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan, (b) strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan dan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat. Dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi, (c) strategi transformatif menunjukkan

bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Pada dasarnya strategi pemberdayaan adalah cara dalam melaksanakan proses pemberdayaan, strategi-strategi diatas memiliki tujuan akhir adanya kemandirian pada klien.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: *Pemungkinan*, *Perlindungan*, *Penyongkong* dan *Pemelihara* (Edi Suharto, 2014).

- a. *Pemungkinan* menciptakan susana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. *Penguatan* memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. *Perlindungan* melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak terlintas oleh kelompokkuat, menghindari terjadinya perdaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus

diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- d. *Penyongkongan* memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyongkong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. *Pemeliharaan* memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Menurut Dubois dan Meley dalam Edi Suharto (2013), memberikan beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat:

- a. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk: (a) merefleksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien (*client partnership*).
- b. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk: menghormati martabat dan harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran.

- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk: memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk: ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan rumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksertaan kesempatan.

### 3. Nelayan

#### a. Karakteristik Nelayan

Nelayan identik dengan kemiskinan. Faktor penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan, seperti kurangnya akses kepada sumber-sumber modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Menurut Arif Satria (2011), secara sosiologis, karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani seiring dengan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat *open access*. Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti

berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, yang dengan demikian elemen risiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka.

Menurut Pollnac (1988) dalam Arif Satria (2011), nelayan pun dapat dibedakan dalam dua kelompok menjadi kelompok nelayan besar (*large scale fisherman*) dan nelayan kecil (*small scale fisherman*). Ciri perikanan skala besar menurut Pollnac (1988) adalah: 1) diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan argoindustri di negara-negara maju; 2) secara relative lebih padat modal; 3) memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari pada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu; 4) menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor. Nelayan skala besar dicirikan oleh besarnya kapasitas teknologi penangkapan ataupun jumlah armada dimana mereka lebih berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan buruh nelayan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dengan organisasi yang kompleks. Sementara itu, perikanan skala kecil lebih beroperasi di daerah kecil yang bertumpang tindih dengan kegiatan budidaya dan bersifat padat karya.

#### b. Posisi Sosial Nelayan

Posisi sosial nelayan sangat menarik untuk dicermati dengan melihat dengan status yang relatif rendah dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang kurang memadai. Hal ini menandakan bahwa nelayan adalah bagian dari masyarakat yang di dalamnya terdapat hubungan

interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Sehingga tingkat kehidupan sosial mengacu pada proses keberlangsungan hidup nelayan dengan segala aspek-aspeknya dalam bermasyarakat.

Rendahnya posisi sosial nelayan diakibatkan keterasingan nelayan. Keterasingan tersebut menyebabkan masyarakat non nelayan tidak mengetahui lebih jauh bagaimana dunia nelayan itu. Keterasingan tersebut terjadi karena sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Tentu ini disebabkan karena banyaknya alokasi waktu nelayan untuk kegiatan penangkapan ikan daripada untuk bersosialisasi dengan masyarakat non nelayan yang memang secara geografis relatif jauh dari pantai (Arif Satria, 2011)

Sesuai dengan permasalahan di atas, menurut Arif Satria (2011) dibutuhkan pemetaan posisi sosial nelayan secara mikro dan makro. Garis besarnya adalah sebagai berikut:

a. Posisi Mikro: Masalah Struktur Sosial

Struktur sosial dalam masyarakat nelayan umumnya dicirikan dengan kuatnya ikatan patron-klien. Pola patron-klien terus terjadi dalam komunitas nelayan karena memang belum ada institusi formal yang mampu berperan sebagaimana patron.

b. Posisi Makro: Masalah Ekonomi Politik

Dilihat secara politik bahwa faktor kapital menjadi sangat dominan dalam menentukan posisi nelayan. Semakin besar penguasaan kapital maka semakin besar pula kesempatan untuk mempengaruhi proses politik. Kekuatan ekonomi atau kapital

mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan kehidupan politik, hukum, dan sosial.

#### **4. PNPM Mandiri – KP**

##### **a. Pengertian PNPM Mandiri – KP**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (Tim Pengendali (TP) PNPM Mandiri, 2007:19-20).

Mengacu pada pedoman PNPM Mandiri bahwa PNPM Mandiri - KP adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diinisiasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan perwujudan dari komitmen nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja khususnya masyarakat bidang kelautan dan perikanan.

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - KP mulai tahun 2009. Melalui PNPM Mandiri - KP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses

pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat pesisir/nelayan miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

b. Tujuan PNPM Mandiri – KP

Dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan, maka harus sejalan dengan tujuan program. Tujuan PNPM Mandiri-KP mengacu pada tujuan PNPM Mandiri secara umum. Tujuan PNPM Mandiri meliputi : (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007:20-21)

b. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

c. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).

- 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- 5) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- 6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Tujuan utama PNPM Mandiri-KP adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai komponen kegiatan yaitu perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis desa; pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan; penguatan kapasitas sumberdaya manusia aparat dan masyarakat serta kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat proses pemberdayaan tidak dapat berlangsung dalam waktu singkat, diharapkan bahwa program ini tidak hanya dilaksanakan dalam waktu setahun tetapi merupakan program prioritas Departemen Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan dalam fokus yang sama sehingga dampaknya dapat terlihat dengan nyata. Selanjutnya pelaksanaan PNPM Mandiri-KP diharapkan dapat mendukung program penanggulangan

kemiskinan yang sedang digalakkan pemerintah utamanya bagi masyarakat kelautan dan perikanan. ([www.kp3k.dkp.go.id](http://www.kp3k.dkp.go.id)).

c. Ruang Lingkup PNPM Mandiri-KP

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP ada banyak kegiatan yang mengacu pada pemberian peluang di masing-masing bidang berdasarkan ruang lingkup PNPM Mandiri-KP. Hal ini akan memberikan pilihan bagi kelompok masyarakat nelayan untuk menentukan arah kegiatan dalam program PNPM Mandiri-KP. Ruang lingkup PNPM Mandiri-KP meliputi:

- a. Perikanan Budidaya
  - b. Perikanan Tangkap
  - c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - d. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - e. Pengolahan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  - f. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- d. Strategi, Prinsip, Pendekatan, dan Dasar Hukum PNPM Mandiri-KP
- a. Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan PNPM Mandiri-KP, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri- KP, 2009:5):

1) Strategi Dasar

Strategi dasar yaitu sebagai salah satu cara mencapai tujuan garis besar secara umum pada pelaksanaan PNPM Mandiri-KP.

Hal ini untuk mengatur pola pemberdayaan dalam PNPM Mandiri-KP agar tidak memenuhi jalan buntu sehingga membutuhkan strategi dasar. Strategi dasar PNPM Mandiri-KP meliputi :

- a) Mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan DKP dengan penyesuaian.
- b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP baik di lingkungan DKP maupun kementerian/lembaga lain yang telah melakukan PNPM Mandiri.
- c) Menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan PNPM Mandiri- KP dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

## 2) Strategi Operasional

Dalam PNPM Mandiri-KP strategi operasional dibutuhkan untuk membantu sebelum pelaksanaan program. Hal ini sebagai acuan untuk perencanaan serta tindak lanjut program agar PNPM Mandiri berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Strategi operasional PNPM Mandiri-KP meliputi :

- a) Melakukan identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumberdaya kelautan dan

perikanan yang ada dalam rangka penyusunan perencanaan pengelolaannya berbasis desa.

- b) Melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, maupun masyarakat
- c) Meningkatkan kapasitas aparatur provinsi dan kabupaten/kota sebagai pengelola PNPM Mandiri-KP di wilayahnya

e. Prinsip Dasar PNPM Mandiri-KP

Dalam prinsip PNPM Mandiri-KP mengacu pada PNPM Mandiri secara umum. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan program PNPM Mandiri-KP sebagai tolak ukur pemberdayaan masyarakat yang memfokuskan diri pada bidang kelautan dan perikanan khususnya bagi masyarakat pesisir yaitu masyarakat nelayan. PNPM Mandiri-KP menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- b. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- c. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

- d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- e. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- h. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- i. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- j. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

- k. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
  - l. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.
- f. Pendekatan PNPM Mandiri-KP

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program PNPM Mandiri-KP dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

- a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
- b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

g. Dasar Hukum PNPM Mandiri – KP

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.25/Men/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan, serta sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA /VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri; Mengingat:
  - 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 9) Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
- 10) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;

- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 12) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- 13) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
- 14) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

h. Pengelolaan PNPM Mandiri-KP

Dalam pengelolaan PNPM Mandiri-KP banyak hal yang harus diperhatikan guna memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri-KP. Pengelolaan PNPM Mandiri-KP mengacu pada pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri-KP. Pengelolaan PNPM Mandiri-KP meliputi : (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri-KP, 2009:7).

a. Harmonisasi Program

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP diperlukan harmonisasi program, sasaran dan lokasi pemberdayaan lingkup DKP yang telah dan akan dilaksanakan. Harmonisasi program dibutuhkan agar terjadi sinkronisasi antara program dengan kebutuhan masyarakat sehingga akan memacu motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sasaran dan lokasi juga diperhatikan dalam menentukan kebutuhan masyarakat sehingga akan mencapai target dalam meningkatkan intensitas pemberdayaan yang sejalan dengan kemajuan program yang akan diberikan kepada masyarakat.

b. Perencanaan Program

Perencanaan di tingkat desa merupakan tahapan pertama kegiatan PNPM Mandiri-KP yang melibatkan masyarakat secara aktif guna menggali kebutuhan masyarakat dengan mekanisme *bottom up*. Tujuan dari perencanaan ini untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi anggota masyarakat desa yang terdiri dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) serta unsur lain yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui musyawarah desa (mudes) atau musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan tenaga pendamping, konsultan dan/atau tenaga ahli.

Apabila terdapat kegiatan dalam perencanaan yang tidak tertampung dalam DIPA PNPM Mandiri-KP, dapat diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi sehingga dapat dipertimbangkan menjadi kebijakan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri-KP dibutuhkan pengelompokan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran program. Hal ini untuk menentukan jenis-jenis kegiatan yang dibutuhkan kelompok masyarakatnya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan dari masyarakatnya. PNPM Mandiri-KP pelaksanaan kegiatannya dikelompokkan dalam:

1) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Lingkungan

Tujuannya adalah untuk mendukung pengembangan usaha. Sasaran pembangunan/rehabilitasi sarana, prasarana dan lingkungan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar serta masyarakat pesisir lainnya yang terkait dengan tujuan PNPM Mandiri-KP yang tergabung dalam kelompok masyarakat, seperti Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pengolah dan/atau Pemasar Hasil Perikanan (KPP), Kelompok

Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). Jenis kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Lingkungan, meliputi :

- a) Pembangunan/penyediaan/ rehabilitasi infrastruktur lingkungan;
  - b) Pembangunan/rehabilitasi ekosistem pesisir;
  - c) Pembangunan/penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pembenihan dan pembesaran ikan;
  - d) Pembangunan/penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana penangkapan ikan;
  - e) Pembangunan/penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - f) Pembangunan/penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengawasan.
- 2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM-KP)

Tujuan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM KP adalah upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sasaran, perangkat pemerintah desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP. Sasaran penguatan kapasitas kelembagaan dari SDM KP adalah kelompok masyarakat, perangkat pemerintah desa dan tenaga pendamping. Jenis kegiatannya meliputi :

- a) Pelatihan Teknis dan Manajemen Usaha Perikanan;
- b) Pelatihan tenaga pendamping

### 3) Pengembangan Usaha Masyarakat

Tujuan Pengembangan Usaha Masyarakat adalah meningkatkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat melalui promosi produk hasil perikanan. Sasaran Pengembangan Usaha Masyarakat adalah produk kelompok masyarakat. Jenis kegiatannya antara lain :

- a) Temu Usaha
- b) Gelar Produk

#### d. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan PNPM Mandiri-KP terdiri dari:

##### 1) Departemen Kelautan dan Perikanan

Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai penanggungjawab dan Pembina PNPM Mandiri-KP dikoordinir oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (Dirjen KP3K). Dalam pelaksanaannya PNPM Mandiri-KP dilakukan oleh Tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang bertugas:

- a) Menyiapkan dan menyusun rencana kebijakan;
- b) Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan Kementrian/Lembaga terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
- c) Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan.

##### 2) Dinas Provinsi

Dinas provinsi bertugas melakukan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di wilayahnya. Dinas provinsi dapat mengusulkan Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai calon penerima PNPM Mandiri-KP tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya Dinas Provinsi berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) PNPM Mandiri.

### 3) Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab operasional PNPM Mandiri-KP bertugas :

- a) Menetapkan Tim Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping, Kelompok Masyarakat sasaran;
- b) Memproses proposal kelompok masyarakat;
- c) Melakukan sosialisasi, publikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e) Melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) PNPM Mandiri. Tim Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari tokoh

masyarakat, aparat pemerintah desa, aparat kecamatan, dinas kabupaten/kota, BAPPEDA dan Tenaga Pendamping yang bertugas :

- a) Melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi proposal kelompok masyarakat;
- b) Melakukan sosialisasi hasil penetapan kelompok masyarakat penerima;
- c) Mendampingi kelompok masyarakat dalam pelaksanaannya PNPM Mandiri-KP;
- d) Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

#### 4) Konsultan

Konsultan PNPM Mandiri-KP terdiri atas empat bidang, yaitu :

- a) Perencanaan Wilayah dan Sumberdaya;
- b) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan;
- c) Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah;
- d) Peningkatan Akses Kredit Mikro

#### 5) Tenaga pendamping

Tenaga Pendamping (TP) merupakan orang yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kelautan dan perikanan yang tinggal di tengah masyarakat sasaran dan mendampingi masyarakat secara terus menerus selama berlangsungnya program. TP berasal dari:

- a) Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil (PPPNS);
- b) Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK);
- c) Tenaga Pendamping program-program pemberdayaan DKP sebelumnya yang berkinerja baik sesuai rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota seperti Tenaga Pendamping Desa (TPD) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Tenaga Pendamping Teknologi (TPT) Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya (PUKPB), atau Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan (KKMB-SKP), yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Sebelum melaksanakan tugasnya, TP diberikan pelatihan teknis, administrasi maupun manajemen oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP). Tugas TP antara lain :

- a) Membuat perencanaan kegiatan pendampingan masyarakat;
- b) Mempersiapkan masyarakat untuk memperoleh berbagai paket bantuan;
- c) Membantu masyarakat dalam menyusun proposal kegiatan usaha;
- d) Mendampingi masyarakat dalam menjalankan kegiatan PNPM Mandiri-KP;
- e) Mendampingi masyarakat dalam proses pencairan dana;

- f) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan program setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota; dan
- g) Mendampingi konsultan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat.

6) Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat melakukan perencanaan kegiatan, mengajukan proposal, dan melaksanakan kegiatan. Kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri-KP adalah kelompok yang ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

c. Penganggaran

1) Sumber Anggaran

Sumber anggaran PNPM Mandiri-KP berasal dari APBN Departemen Kelautan dan Perikanan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

2) Pengelolaan Anggaran

Dalam rangka pengelolaan anggaran PNPM Mandiri-KP pencairan anggaran untuk semua komponen kegiatan yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

i. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi memberikan berbagai informasi mengenai kekurangan, kelebihan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan merupakan masukan bagi pelaksanaan

kegiatan selanjutnya. Kegiatan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari kelompok masyarakat, dinas kabupaten/kota, dinas provinsi pada setiap tahapan program yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri-KP oleh Tim PNPM Mandiri-KP dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Evaluasi PNPM Mandiri-KP dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan indicator kinerja masukan (input), pelaksanaan (process) dan keluaran (output) yang ditetapkan terhadap tujuan dan sasaran program.

## **B. Kerangka Konsep**

Fenomena kemiskinan masyarakat pesisir khususnya nelayan seolah menjadi tak terbantahkan dengan berbagai kondisi kesulitan ekonomi karena krisis yang berkepanjangan. Dalam rangka mengatasi kesulitan hidup ekonomi masyarakat pesisir maka pemerintah melakukan pembenahan di sektor sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan berbagai program pemberdayaan dalam rangka penuntasan kemiskinan. Program pemberdayaan itu adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri - KP).

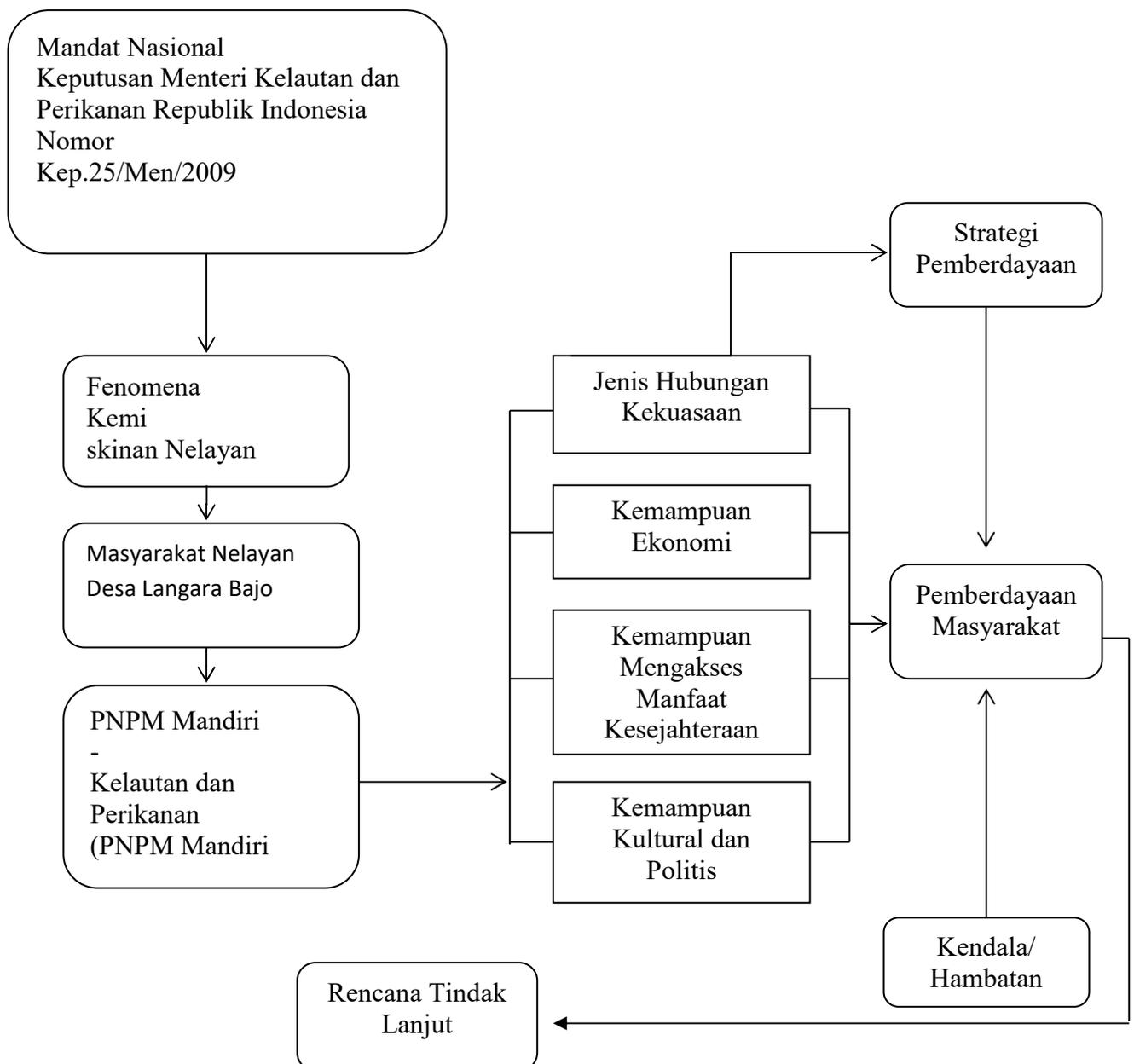
Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu penerima program PNPM Mandiri-KP khususnya di Desa Langara Bajo dengan kultur masyarakatnya yang sebagian besar hidup di sektor kelautan dan perikanan. Upaya pemberdayaan telah dilakukan di desa tersebut, untuk itu Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) selaku pengelola program merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri - KP.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.25/Men/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah peletak dasar dilaksanakannya PNPM Mandiri - KP. Dalam hal ini menjadi acuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri - KP.

PNPM MANDIRI - KP yang diinisiasi oleh DKP mulai tahun 2009 merupakan perwujudan dari komitmen nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan dirumuskan dengan melibatkan unsur masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan, sehingga mereka bukan sebagai obyek, melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Terkait dengan indikator keberdayaan yang meliputi jenis hubungan kekuasaan, kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan kultural dan politis akan menjadi dimensi penghubung dalam proses, pelaksanaan, hambatan-hambatan, maupun tindak lanjut dari pemberdayaan masyarakat nelayan yang berorientasi pada program PNPM Mandiri – KP tersebut. Oleh sebab itu maka perlu disusun kerangka teori yang dapat menghubungkan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan dengan kajian teori yang ada sehingga dapat digambarkan secara jelas sesuai dengan konteks penelitian yang diharapkan.

Kerangka konseptual memaparkan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor kunci dan hubungan-hubungan antara dimensi-dimensi yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis. Dalam penelitian ini kerangka konseptual Strategi PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, dimana kelompok masyarakat nelayan yang diberdayakan. Berikut adalah kerangka pikir penelitian ini:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Artinya data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka- angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.

Sesuai dengan judul yaitu Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Nelayan di Desa Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sultra, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang permasalahan yang akan dibahas yang berkenaan dengan proses, pelaksanaan, hambatan-hambatan serta tindak lanjut dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui PNPM Mandiri - KP.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara sebagai lokasi penelitian yaitu: pertama karena daerah ini merupakan daerah pesisir yang mayoritas penduduknya atau masyarakatnya menggantungkan hidupnya di sektor kelautan dan perikanan atau nelayan. Kedua peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri- Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) yang diadakan di desa tersebut.

### **C. Informan Penelitian**

Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yakni :

1. Informan Ahli yakni mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Informan Kunci yakni mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir pantai.
3. Informan Biasa yakni mereka yang terlibat langsung dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir.

### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Apabila digunakan istilah rumusan masalah, fokus penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus didukung oleh alasan-alasan mengapa hal tersebut ditampilkan (Afifudin 2011).

Jadi fokus dalam penelitian ini adalah mengacu pada tujuan penelitian yaitu:

1. Mendeskripsikan strategi PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara.
2. Mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*humaninstrumen*), yang berfungsi sebagai penetap focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan menyimpulkan data secara obyektif dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman observasi, pedoman wawancara (daftar pertanyaan), pedoman dokumentasi (data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Desa Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sultra).

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data penelitian terdiri dari:

1. Informan utama adalah Ketua Pengelola PNPM Mandiri-KP dan Anggota Kelompok Masyarakat Nelayan dimana berperan sebagai pengelola PNPM Mandiri-KP di masyarakat khususnya nelayan merupakan pelaku pemberdayaan. Mereka akan dimintai informasi mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara.
2. Selain informan utama peneliti juga menggali sumber data dari pihak lain atau informasi pendukung seperti: tenaga pendamping PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data penelitian ini diantaranya:

## 1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka (Afifudin, 2011).

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh peneliti kepada informan dengan maksud untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkap yaitu (1) Strategi PNPM Mandiri-KP di Kelurahan Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara, dan (2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP Desa Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara. Adapun wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara ini diajukan kepada pengelola PNPM Mandiri - KP di Kelurahan Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pengelola PNPM Mandiri - KP, Kelompok Masyarakat penerima BLM, petugas Kelurahan, dan tokoh masyarakat.

## 2. Metode Observasi

Disamping wawancara, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini (dalam Afifudin, 2011) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, aktivitas proses pemberdayaan, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode yang mencari hal-hal yang berupa catatan suatu buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dokumentasi juga dimaksudkan sebagai rekaman suatu peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema, atau kategori tertentu. Setiap penafsiran data akan memberi makna kepada analisis. Langkah utama dalam analisis adalah pengumpulan data, perbaikan kerangka data sehingga lebih akurat, penyusunan unsur-unsur data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna, reinterpretasi data melalui hubungan-hubungan dan akurasi hubungan antar data, melakukan perubahan yang mengarahkan pada pengumpulan data guna mempermudah pelaksanaan penelitian berikutnya (Beni Ahmad, 2013).

Analisis data secara sistematis dilakukan dengan tiga langkah secara bersamaan, yaitu:

### 1. Reduksi Data

Analisis reduksi atas data adalah bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi sistematis yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian tersebut dapat berbentuk matrik, grafik, jaringan, dan bagan.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan simpulan / verifikasi dilakukan sejak permulaan, pengumpulan data, pembuatan pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat serta proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

Menurut Miles dan Huberman, 2012 proses penarikan kesimpulan dilakukan dari awal pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

## H. Teknik Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk membuktikan kebenaran data yaitu melalui ketekunan pengamatan di lapangan, triangulasi, pengecekan, referensi yang memadai. Untuk membentuk keabsahan data dalam penelitian ini, teknik pengamatan lapangan dilakukan dengan triangulasi sumber data yaitu dari Ketua Pengelola PNPM Mandiri-KP, Tenaga Pendamping, dan Anggota Kelompok Masyarakat penerima BLM PNPM Mandiri-KP.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Ada dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber (Ahmad Saebani, 2012).

Informasi yang diperoleh diusahakan dari narasumber yang betul-betul mengetahui PNPM Mandiri - KP yang dijadikan subyek penelitian. Informasi yang diberikan oleh salah satu subyek dalam menjawab pertanyaan peneliti akan di cek ulang dengan jalan menanyakan ulang pertanyaan yang sama kepada subyek yang lain. Apabila kedua jawaban yang diberikan sama maka jawaban itu dianggap sah. Apabila kedua jawaban itu saling berlawanan atau berbeda, maka langkah alternatif sebagai solusi yang tepat adalah dengan mencari jawaban atas pertanyaan itu kepada petugas PNPM Mandiri - KP yang ada di Desa Langara Bajo Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi

Tenggarasebagai pelaksana program yang mengurus dan mengelola tentang PNPM Mandiri - KP.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu pemeriksaan melalui sumber data. Dengan teknik triangulasi sumber data maka penelitian ini: (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara (2) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat atau pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berada atau pemerintah, (3) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Sedangkan prosedurnya yaitu peneliti membandingkan antara data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, karena metode ini sangat memungkinkan untuk dilakukan agar terjadi kesesuaian antara data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan memiliki tingkat kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Desa Langara Bajo merupakan desa pecahan dari desa Langara Indah yang dibentuk pada tahun 2007. Desa Langara Bajo merupakan desa pesisir yang terletak di Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan Propinsi Sulawesi Tenggara. Luas wilayah Desa Langara Bajo 485 Ha yang dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun yaitu:

- a. Dusun 1
- b. Dusun 2
- c. Dusun 3 (Sumber Data: Wawancara dengan Sekretaris Desa tahun 2017)

##### **2. Batas Wilayah Desa Langara Bajo**

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Langara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langara Indah
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan daratan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan laut.

##### **3. Keadaan Demografi**

- a. Bertambahnya Jumlah Penduduk

Penduduk suku Bajo di Desa Langara Bajo diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang tinggi, beberapa angka kelahiran pertahun. Imigrasi penduduk yang berdatangan ke Langara Bajo dan

tingginya kelahiran, keberadaan penduduk ini akan meningkatkan kebutuhan pembangunan, terutama pemukiman masyarakat Bajo. Pembangunan kawasan pemukiman masyarakat Bajo di Desa Langara Bajo akan semakin meningkat. Sejalan dengan kebutuhan penduduk akan tempat tinggal, sayangnya pengembangan pemukiman penduduk dilakukan hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dimasa yang akan datang. Hal ini sangat berbeda dengan konsep pembangunan Taman Nasional yang mengutamakan kelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan, yang akan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lebih memprihatinkan lagi apabila generasi ini melakukan pembangunan dengan mengikuti pola-pola pembangunan generasi saat ini.

Hal ini, mungkin terjadi karena generasi ini akan bersosialisasi sebelum mereka yang melakukan pembangunan dengan cara eksploitasi SDA. Dengan segala proses itu, segala individu dari masa anak-anak, hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam berinteraksi dengan individu sekelilingnya (Koetjaraningrat 2015). Masalah pemukiman merupakan masalah penduduk ketika jumlah penduduk kecil, cara hidupnya dapat disesuaikan dengan lingkungan, namun dengan bertambahnya penduduk, cara hidup dan bermukimnya penduduk tidak lagi disesuaikan dengan lingkungan, bahkan sebaliknya lingkungan diubah dan dicocokkan dengan hidup mereka.

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan registrasi penduduk tahun 2017, penduduk masyarakat Bajo di Desa Langara Bajo sebanyak 500 jiwa.

c. Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Penduduk masyarakat Bajo di Desa Langara Bajo pada tahun 2017 sebanyak 502 jiwa. Secara umum sebagian besar penduduk Desa Langara Bajo berusia produktif. Adapun komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin**

Desa Langara Bajo	Jumlah Penduduk	Rincian Penduduk Menurut Usia (Tahun)						
		0-5	6-12	13-16	17-25	26-35	36-49	50-70
Dusun 1	147	13	25	17	12	23	45	12
Dusun 2	151	14	11	13	27	24	27	35
Dusun 3	204	23	28	25	21	34	46	27
<b>Jumlah</b>	<b>502</b>	<b>50</b>	<b>64</b>	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>81</b>	<b>118</b>	<b>74</b>

Sumber: *Data Primer 2017*

d. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Sesuai dengan keadaan alam dilingkungan masyarakat Bajo di Desa Langara Bajo yang dikelilingi oleh laut yang sangat potensial sumber dayanya, masyarakat Bajo di Desa Langara Bajo pada umumnya bermata pencaharian pokok sebagai nelayan. Akan tetapi sebagian penduduk masyarakat Bajo di Desa Langara Bajo tidak menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian satu-satunya dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengetahui lebih jelas mata pencaharian yang digeluti oleh penduduk masyarakat Bajo di Desa Langara Bajo dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

Desa Langara Bajo	Jumlah Penduduk	Rincian Penduduk Menurut Mata Pencaharian						
		Petani	Nelayan	PNS	TNI	Pedagang	Wiraswasta	dll
Dusun 1	147	-	51	1	-	5	-	90
Dusun 2	151	2	66	5	-	2	1	75
Dusun 3	204	-	68	-	1	2	-	133
Jumlah	502	2	185	6	1	9	1	298

Sumber: *Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa penduduk masyarakat Desa Langara Bajo yang bermata pencaharian terbanyak adalah nelayan yaitu sebanyak 185 jiwa, sedangkan mata pencaharian terendah adalah TNI dan Wiraswasta sebanyak 2 , kemudian Pedagang sebanyak 9 jiwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6 jiwa, Petani sebanyak 2 jiwa. Jelas bahwa penduduk Desa Langara Bajo sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan penangkapan ikan.

e. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum pendidikan masyarakat Bajo di Desa Mola Selatan memiliki pendidikan yang tergolong menengah kebawah hal

ini terlihat dari besarnya jumlah kepala keluarga yang berpendidikan SD dan tidak sampai pada jenjang yang lebih tinggi (Sarjana). Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Desa Langara Bajo	Jumlah Penduduk	Rincian Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan								
		SI	D3	D2	SMA	SMP	SD	PAUD	TT. SEKO LAH	T. SEKO LAH
Dusun 1	147	-	-	-	9	17	17	4	64	36
Dusun 2	151	8	2	1	21	17	37	-	27	38
Dusun 3	204	-	1	-	12	17	53	-	80	41
Jumlah	502	8	3	1	42	51	107	4	171	115

Sumber: *Data Primer 2017*

Pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Langara Bajo kebanyakan adalah tidak tamat SD sebanyak 171 jiwa, dan jenjang pendidikan yang paling rendah adalah D2 sebanyak 1 jiwa, kemudian S1 sebanyak 8 jiwa, D3 sebanyak 3 jiwa, SMA sebanyak 42 jiwa, SMP sebanyak 51 jiwa, PAUD sebanyak 4 jiwa dan tidak sekolah sebanyak 115 jiwa.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di daerah masyarakat di Desa Langara Bajo masalah pendidikan masih minim dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk menunjang perkembangan Desa Langara Bajo dimasa yang akan datang.

f. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Pada umumnya masyarakat di Desa Langara Bajo mayoritas beragama Islam yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi sehingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur selalu terlaksana dengan baik yang diwarnai dengan semangat gotong-royong. Hal ini, terlihat karena rasa persatuan dan kesatuan di antara warga, sehingga hubungan antara satu dengan yang lainnya sangat harmonis. Penduduk masyarakat Desa Langara Bajo yang berjumlah 502 jiwa 100 % beragama Islam.

**B. Hasil Penelitian**

**1. Strategi Pemberdayaan PNPM Mandiri-KP**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. Dalam strategi pemberdayaan masyarakat nelayan melalui PNPM Mandiri-KP di Langara Bajo ada beberapa strategi pemberdayaan yaitu meliputi:

a. Pemungkinan

Iklim pemberdayaan pada saat PNPM Mandiri-KP berjalan di Desa Langara Bajo dalam suasana yang kondusif dengan proses berjalan lancar berkat peran serta desa. Pada waktu mulai identifikasi kelompok di tiap desa yang dilaksanakan di Kecamatan Wawonii Barat banyak pengajuan kelompok yang rata-rata 50 kelompok tiap desa kemudian terseleksi ada 23 kelompok. Untuk kelompok Desa Langara Bajo ada 7 kelompok masyarakat yang terseleksi.

Hal ini dibuktikan ketika peneliti mewawancarai ibu J', ketua kelompok Citra Rasa 2 mengatakan bahwa suasana/iklim pemberdayaan saat berlangsungnya PNPM Mandiri-KP adalah

*“suasananya rame mas banyak yang setuju sama program ini, banyak yang pada ngajuin proposal. ngajuinnya ada konsultan sama tenaga pendamping biar dibantu cara membuat proposalnya”*.

Daya dukung masyarakat menjadi modal penting dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP. Penerimaan masyarakat begitu antusias karena tiap kelompok di Desa Langara Bajo membuat proposal walaupun tidak semua proposal bisa lolos. Apalagi dengan adanya tawaran pembuatan jalan setapak yang kebetulan di desa tersebut jalannya jauh dari harapan. Pada saat pelaksanaan berlangsung banyak warga yang memberikan sumbangan berupa makanan, bata, pasir sehingga target pengerjaan jalan semakin cepat dari rencana awal.

b. Penguatan

Pemberian pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari penguatan kepada masyarakat agar mereka bisa hidup secara mandiri. Mengenai bagaimana mereka dapat mengakses pengetahuan dan keterampilan dari adanya PNPM Mandiri-KP tentunya disadari bahwa program tersebut mampu memberdayakan masyarakatnya. Apa yang kelompok masyarakat peroleh dari adanya penguatan adalah pengetahuan dan keterampilan.

Hal ini dibuktikan saat peneliti mewawancarai Bapak M' ketua kelompok sumber hidayah 13 mengenai pengetahuan dan keterampilan apa saja yang mereka dapat dari PNPM Mandiri-KP adalah

*“Kelompok itu ada yang bisa mengolah krupuk ikan biar ada penghasilan tambahan, bisa mengerti budidaya ikan, bisa membuat bubu, membuat jaring untuk menangkap ikan, tahu menangkap ikan yang ramah lingkungan nggak pake bom, bisa buat organisasi, trus bisa mengerti kredit perbankan”.*

Kemudian ada berbagai masalah yang muncul terkait adanya PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo serta berbagai pemecahan masalah yang dilakukan guna menanggulangi masalah-masalah yang ada. Ketika peneliti mewawancarai Bapak D' ketua kelompok Sumber Hidayah 4 mengenai masalah apa saja yang terjadi adalah

*“Ada kecemburuan sosial bagi kelompok yang tidak dapat dana bantuan PNPM Mandiri-KP karena sebelumnya pemilihan kelompok harus melalui seleksi”.*

Solusi pemecahan masalah yang dilakukan terkait masalah di atas dari pihak pengelola mengatakan bahwa

*“kami menyadarkan mereka bahwa program tidak hanya PNPM-KP saja tetapi masih banyak dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kelompok yang tidak dapat PNPM Mandiri-KP tetap diprioritaskan untuk dapat program lainnya dan itu dikordinir dan diatur oleh kepala desa atau sekretaris desa”.*

### c. Perlindungan

Keamanan lingkungan menjadi pusat perhatian pelaksanaan PNPM Mandiri-KP. Dengan keamanan lingkungan yang kondusif

serta kesadaran warga Desa Langara Bajo maka pada saat sebelum dan setelah berlangsungnya program dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta tidak ada bahaya yang menghadang seperti konflik dengan masyarakat sekitar.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak J.

*“keamanan lingkungan disini sangat mendukung ko mas untuk program-program pemberdayaan, karena masyarakat disini sangat membutuhkan bantuan dan uluran dari pemerintah. Makanya setiap ada program banyak peminatnya yang ikut berpartisipasi”.*

d. Penyokongan

Penyokongan dengan memberikan bimbingan dan dukungan dari masyarakatnya agar tercipta kesinambungan program. Pengelola membimbing kelompok masyarakatnya agar mereka mengenal bagaimana cara mengusulkan program dengan membuat proposal. mereka juga disokong pengetahuan mengenai budidaya yang intensif dan ramah lingkungan, tahu fungsi dari tanaman bakau untuk mencegah abrasi pantai dan tempat memijah bagi habitat ikan-ikan.

Masyarakat sekitar mengakui sangat mendukung dengan adanya bimbingan yang mereka terima dari adanya PNPM Mandiri-KP. Namun lebih dari itu masyarakat sangat memberikan apresiasi karena kebutuhan akan program menjadi sangat penting disaat kehidupan mereka sedang terpuruk.

Berikut ini pernyataan Bapak A ketika Peneliti mewawancarai.

*“kelompok kami dibimbing oleh konsultan dan tenaga pendamping. Dari mereka kelompok kami jadi mengenal pembuatan proposal, berorganisasi, dan keterampilan mengolah kerupuk ikan tentunya”*

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan menyangkut sarana dan prasarana yang ada. Bagaimana mereka mampu memelihara sarana dan prasarana yang ada yang diberikan melalui program PNPM Mandiri-KP. Diharapkan dengan kelompok masyarakat memelihara sarana dan prasarana yang ada mampu menciptakan suasana yang kondusif.

Ketika peneliti mewawancarai bapak H' mengenai sarana dan prasarana apa saja yang ada pada PNPM Mandiri-KP adalah

*“Peralatan budidaya, pengolah terasi, gill net, mesin pengolah krupuk ikan, sampai jalan setapak pastinya harus dijaga tetap dipakai dan memang kalau rusak sudah menjadi tanggungan kelompok masyarakatnya”.*

## **2. Hambatan-Hambatan PNPM Mandiri-KP**

Hambatan-hambatan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo meliputi:

a. Pengembangan Program

Pengembangan program untuk mengukur sejauh mana tingkat SDM masyarakat Desa Langara Bajo. Tingkat SDM Desa Langara Bajo sendiri sudah lebih baik dibandingkan dengan desa lainnya

yang ada di Kecamatan Wawonii Barat. Hal itu telah dibuktikan ketika peneliti mewawancarai Ibu I' ketua kelompok Citra Rasa 1 mengatakan bahwa

*“tingkat SDM disini sudah baik mas, rata-rata yang ikut program baik dari kalangan nelayan, bakul maupun masyarakat biasa tingkat pendidikannya baik dari apa yang diharapkan. Rata-rata sih SD, yang penting bisa membaca sama menulis mas”.*

Hambatan-hambatan yang di peroleh dari adanya program pada modal kebanyakan kelompok masyarakat lebih kearah budidaya dan pengolahan. Bagaimana tidak kalau semuanya tergantung pada musim panen raya. Kalau musimnya baik mungkin hasilnya akan baik, karena pasokan bahan baku untuk pengolahan krupuk atau terasi tidak serta merta ada. Hasil tangkapan nelayan pun kadang tidak sesuai dengan harapan akibat cuaca buruk yang memungkinkan nelayan tidak melaut. Hal itu dibuktikan ketika peneliti mewawancarai Ibu I' ketuadari kelompok Citra Rasa 1 mengatakan bahwa

*“hambatannya dalam mengembangkan modal ada pada pembudidayaan dan pengolahan mas. Pada pembudidayaan biaya untuk pakan ikan saja sudah naik akhirnya harga ikan menjadi mahal lagian nelayan juga sulit menangkap ikan akibat cuaca buruk. Kebanyakan dari anggota kelompok juga konsumtif jadi kalau ada modal sedikit dipakai langsung habis. Untuk mengolah ikan menjadi kerupuk atau terasi saja kadang harus nunggu musim panen tiba biar produksinya banyak”.*

Hambatan-hambatan pada akses pemasaran produk juga menjadi kendala utama mengembangkan usaha. Hal ini dibuktikan

ketika peneliti mewawancarai Ibu J' ketua kelompok Citra Rasa 2 mengatakan bahwa

*“produk kita harus bersaing dengan produk lain mas, kalau mau keluar daerah, masuk ke took-toko atau supermarket perlu ada ijin usaha dulu jadi nanti produknya baru bisa diterima. Sampai saat ini produksi dibuat kalau ada pesanan saja mas. Kadang bahan bakunya saja susah, kan ikan tergantung musim panen mas”*.

Keberadaan sarana dan prasarana yang kurang menunjang masih banyak ditemui di Desa Langara Bajo terutama sarana MCKnya karena kebanyakan masyarakat menggunakan sarana itu untuk mandi dan cuci saja. Sedangkan kakus masih jauh dari harapan. Kebanyakan dari mereka buang hajat di sungai. Jadi kesadaran akan kesehatannya sangat kurang dari apa yang diharapkan.

Hambatan juga terjadi pada partisipasi masyarakat Desa Langara Bajo dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri-KP terutama dalam pembuatan jalan setapak dimana ada sebagian masyarakatnya yang depan rumahnya dijadikan jalan lingkungan. Namun hal ini bisa diatasi dengan peran serta kades maupun sekdes setempat dalam memberikan arahan kepada masyarakatnya bahwa akan sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat nantinya.

b. Kelembagaan Masyarakat

Hambatan-hambatan yang terjadi pada organisasi kelompok dalam PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo yaitu banyaknya

anggota nelayan tetapi hanya sebagian kecil saja yang ikut, akhirnya banyak nelayan yang menekan kelompok yang mendapat PNPM Mandiri-KP karena tidak kebagian BLM. Padahal dalam menentukan layak atau tidaknya kelompok menerima BLM harus melalui identifikasi, seleksi dan verifikasi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan pengajuan proposal kegiatannya. Dalam pelaksanaannya juga banyak nelayan yang mengira kalau dana dari pemerintah kepada semua nelayan dibagi rata. Jadi semuanya harus melalui prosedur PNPM Mandiri-KP.

Hal ini dibuktikan ketika peneliti mewawancarai Tenaga Pendamping PNPM Mandiri-KP mengatakan bahwa

*“ada banyak nelayan yang mengaku kecewa karena kelompoknya tidak masuk dalam daftar penerima BLM, mereka juga mengira kalau BLM ini nantinya dibagi rata. Padahal ini adalah BLM yang dialokasikan untuk kelompok yang lolos seleksi proposalnya”.*

Bentuk dukungan pemerintah dan LSM dalam membantu pelaksanaan PNPM Mandiri-KP ini kalau dari pemerintah sendiri memberikan dana bantuan pembuatan saluran air untuk rumah tangga masyarakat sekitar sehingga kebutuhan akan air bersih sudah layak tersedia. Untuk aparat desa sendiri memberikan apresiasi dan menjaga selama pelaksanaan agar tidak terjadi konflik.

Menurut kelompok masyarakat dengan adanya PNPM Mandiri-KP dapat menciptakan lapangan kerja baru karena dengan keterampilan yang mereka miliki diharapkan mampu membuat

perubahan di Langara Bajoo terutama pada bidang penangkapan dan pengolahan hasil perikanan. Hal ini dibuktikan peneliti ketika mewawancarai Bapak D' ketua kelompok Sumber Hidayah 12 mengatakan bahwa

*“yang saya harapkan sih nanti ada lapangan kerja, karena kan masyarakat disini banyak yang terampil membuat jaring kejer, trus juga ada kelompok yang mendapat bantuan mesin pengolah ikan, harapan saya sih nanti bisa berkembang”.*

Jalinan kemitraan sangat dibutuhkan setelah selesainya PNPM Mandiri-KP. Hal ini diwujudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam mengurangi kesenjangan kelompok masyarakat pada utang yang mungkin saja bisa membelit mereka. Koperasi Sumber Hidayah yang ada di Desa Langara Bajo selama ini adalah yang menjembatani antar kelompok masyarakat. Segala kegiatan ada di koperasi tersebut baik sebagai wadah pertemuan maupun masalah simpan pinjam di kalangan kelompok masyarakat khususnya nelayan di Desa Langara Bajo.

#### c. Konflik Kultural

Sebagaimana peneliti mengamati bahwa konflik di desa dapat dicegah karena banyak institusi-institusi dari pemerintah daerah, DKP, maupun aparat desa setempat terkait selama pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana. Namun disadari bahwa adanya penolakan dari kelompok masyarakat terutama pada kegiatan budidaya dimana harus ada tambak yang akan dilaksanakan

kegiatan budidaya tersebut, karena mereka berfikir untuk mencari lahan sewa untuk program ini susah dan sebagian besar masyarakatnya tidak mau. Masyarakat sekitar memandang kalau tanahnya lebih produktif untuk digarap sendiri daripada untuk pelaksanaan program budidaya dimana mereka hidupnya lebih bergantung pada hasil tambaknya.

Hal ini dibuktikan peneliti saat mewawancarai Bapak T' ketua kelompok Sumber Hidayah 3 mengatakan bahwa

*“ada yang menolak mas waktu sosialisasi PNPM Mandiri-KP menyertakan program Budidaya, karena kan disini kalau budidaya harus ngurus sewa lahan. Apalagi sewa lahan juga mahal makanya kegiatannya dialihkan ke yang lain”.*

Kemudian ada banyak respon masyarakat baik sebelum maupun sesudah PNPM Mandiri-KP berjalan. Partisipasi masyarakat yang begitu antusias merupakan bagian dari respon masyarakat yang menginginkan adanya program pemberdayaan di Desa Langara Bajo. Ini terjadi ketika sebelum masuknya PNPM Mandiri-KP di desa tersebut. Sesudah pelaksanaanpun mereka merasakan manfaat dari adanya PNPM Mandiri-KP di desa tersebut, salah satunya adalah jalan setapak yang dibangun dari dana BLM kepada kelompok masyarakat di desa tersebut, masyarakat sangat menikmati apa yang sudah di sediakan. Kemudian juga bantuan peralatan mesin pengolahan hasil laut juga menjadi awal bagi mereka untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

## **C. Pembahasan**

### **1. Strategi PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan**

Menurut Edi Suharto (2014:66) proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif dan tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Pada dasarnya strategi pemberdayaan adalah cara dalam melaksanakan proses pemberdayaan dengan tujuan membentuk kemandirian klien. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (Suharto, 2014:67).

PNPM Mandiri-KP sebagai salah satu langkah program pemberdayaan yang mengarah kepada kelompok masyarakat khususnya masyarakat nelayan. Nelayan sebagai suatu komunitas masyarakat dimana

banyak terjadi kemiskinan menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini PNPM Mandiri-KP sebagai program pemberdayaan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat yang kegiatannya dilakukan sesuai dengan proposal yang diajukan masyarakat dengan asumsi dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara bottom up sesuai aspirasi masyarakatnya. Dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri

Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dengan adanya PNPM Mandiri-KP yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang dilakukan di Desa Langara Bajo sendiri lebih mengarah pada dua strategi yang dijalankan yaitu: (1) Strategi Dasar, meliputi (a) Mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan DKP dengan penyesuaian, (b) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP baik di lingkungan DKP maupun kementerian/lembaga lain yang telah melakukan PNPM Mandiri, (c) Menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan PNPM Mandiri-KP dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. (2) Strategi Operasional, meliputi (a) Melakukan identifikasi dan kajian seluruh potensi dan permasalahan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada dalam rangka penyusunan perencanaan pengelolaannya berbasis desa, (b) Melibatkan secara aktif pemangku kepentingan terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang

berasal dari pemerintah pusat dan daerah, maupun masyarakat, (c) Meningkatkan kapasitas aparaturnya provinsi dan kabupaten/kota sebagai pengelola PNPM Mandiri-KP di wilayahnya.

Dalam strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Langara Bajo sesuai dengan prosedur bahwa kelompok masyarakat nelayan diposisikan dan diperlakukan sebagai subjek pemberdayaan karena mereka yang menjadi pelaku aktif atau aktor utama pembangunan di daerahnya. Pemberdaya kelompok masyarakat dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan diletakkan sebagai mediator dan fasilitator pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan pada kelompok masyarakat Desa Langara Bajo pada PNPM mandiri-KP merupakan kegiatan yang berwujud fisik seperti kegiatan membangun sarana dan prasarana ekonomi dan sosial.

Namun tidak keluar dari substansi program dimana diarahkan sepenuhnya untuk investasi pembangunan SDM dalam jangka waktu tertentu. Terbukti dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok masyarakat yang menerima program. Daya dukung masyarakat menjadi eksistensi masyarakat pada pelaksanaan PNPM Mandiri-KP dengan menciptakan suasana yang kondusif pada saat berlangsungnya program didukung dengan keamanan lingkungan yang baik. Dengan strategi pembentukan kelompok masyarakat nelayan juga pada saat berlangsungnya PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo memberikan masyarakat peluang untuk bekerja bersama-sama membentuk organisasi

kelompok kecil untuk menggali potensi sumber daya yang ada di Desa Langara Bajo sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakatnya.

## **2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri–KP di Desa Langara Bajo Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan**

Berhasilnya sebuah proses pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) warga belajar dilatih untuk mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan ekonomi, (2) dilatih atau diberikan berbagai macam keterampilan sebagai jawaban atas kebutuhan dan masalah yang dihadapinya, dan (3) dibina untuk selalu suka bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. (Kindervatter, 2002:150).

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di Langara Bajo tentunya menjadi perhatian dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri-KP. Banyak hal yang bisa diungkap selama pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo terutama hambatan yang terjadi pada kelompok masyarakat penerima BLM PNPM Mandiri-KP. Pada dasarnya masih rendahnya pemahaman tentang PNPM Mandiri-KP banyak terjadi di tingkat aparatur maupun masyarakat. Sehingga perlu ditindaklanjuti dalam memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik bagi pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo.

Tingkat SDM yang rendah diduga sebagai salah satu acuan dalam pengembangan program PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo. Dari sebagian besar kelompok masyarakat kebanyakan dari anggotanya tingkat pendidikannya masih minim yaitu hanya SD saja. Namun dalam pelaksanaan program dibutuhkan ketua kelompok yang paling tidak mampu membuat kebijakan menentukan arah program kegiatan yang dibutuhkan kelompok masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dibutuhkan pada kepemimpinan organisasi kelompok masyarakatnya untuk membenahi diri mengatur apa yang ada pada kegiatan PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo.

Bantuan modal yang diberikan melalui PNPM Mandiri-KP kepada kelompok masyarakat di Desa Langara Bajo menurut kelompok masyarakat dinilai masih jauh dari harapan. Terbukti dengan banyaknya kelompok masyarakat yang lain yang belum dapat menerima akses dana BLM dari PNPM Mandiri-KP. Semua harus melalui prosedur yang berlaku pada program dari proses identifikasi, seleksi, dan verifikasi kelompok masyarakat mana saja yang layak untuk menerima dana BLM tersebut.

Hambatan-hambatan yang terjadi pada kelompok masyarakatnya juga terjadi pada akses pemasaran produk mereka yang dinilai tidak bisa bersaing dengan produk dari daerah lain karena harus mengurus ijin produksi dahulu bila ingin bisa bersaing dengan produk lain. Sehingga hal ini membutuhkan solusi bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan

produknya secara lebih baik lagi. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Langara Bajo juga tentunya membutuhkan pembenahan lagi karena tingkat kesadaran masyarakatnya akan kesehatan masih kurang terutama dalam hal kebersihan lingkungannya.

Hal-hal yang memicu lahirnya konflik dapat dihindari dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP terutama pada pelaksanaan PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo terkait pembangunan jalan setapak dimana ada penolakan dari warga masyarakat karena merasa dirugikan akibat pembangunan jalan tersebut. Namun hal itu sudah bisa diredam dengan pendekatan kekeluargaan serta sosialisasi kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa: Strategi PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo menekankan pada strategi diantaranya pemungkinan menekankan pada iklim pemberdayaan yang didukung oleh masyarakatnya, penguatan mengarah pada pemberian kebutuhan pelatihan usaha bidang perikanan dan kelautan, perlindungan memberikan rasa aman dan nyaman bagi kelompok masyarakat pelaku usaha perikanan dan kelautan, penyokongan dengan memberikan pengetahuan dan bimbingan pelatihan tentang usaha bidang perikanan dan kelautan, dan pemeliharaan dengan memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan usaha kelautan dan perikanan yang dikelola oleh kelompok masyarakatnya.

Hambatan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui PNPM Mandiri-KP di Desa Langara Bajo ini adalah modal yang diterima untuk tiap kelompok masyarakat harus melalui tahapan lolos verifikasi proposal, karena tidak semua kelompok masyarakat nelayan mendapat bagian dana BLM akibatnya sebagian kelompok merasa kecewa tidak bisa mengembangkan usahanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa simpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya dalam strategi PNPM Mandiri-KP tidak hanya membentuk kelompok saja dalam pelaksanaan PNPM Mandiri-KP, namun juga pemerintah harus memberikan dukungan secara komprehensif yaitu secara menyeluruh pemberian pengetahuan dan bimbingan bidang usaha perikanan dan kelautan juga harus menyentuh kelompok masyarakat yang lain yang tidak ikut PNPM Mandiri-KP karena kebutuhan mereka akan pengembangan usaha bidang perikanan dan kelautan masih jauh dari harapan.
2. Pemerintah Kabupaten dari hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) harus membuka diri untuk bekerjasama dengan elemen masyarakat dalam penanganan PNPM Mandiri-KP agar masyarakat senantiasa dapat meningkatkan kegiatan usaha agar terwujud kesejahteraan di tingkat kelompok masyarakat nelayan yang miskin yang membutuhkan bantuan modal agar berkembang lebih maju dan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2013. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2012. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali Basri, 2006. *Perubahan Pola Hidup Orang bajo di Desa Bungin Permai dari Nomaden d Laut Menjadi Menetap di Laut*. Laporan Hasil Penelitian. Kendari: Universitas Haluoleo.
- Anwar,2004. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Pelatihan Keterampilan Budidaya Ikan Laut alam Keramba (Kaji Tindak pada Masyarakat suku Bajo di Kecamatan Soropia kabupaten Kendari)*. Laporan Hasil Penelitian. Kendari: Universitas Haluoleo
- Beni Ahmad Saebani, 2014. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Devinisi Nelayan. Online. <http://id.wikipedia.org/wiki/Nelayan>. (diakses 23 juli 22.00 WITA).
- <http://lafadl.wordpress.com/2017/07/20/empowerment-and-urban-poverty-alleviation-in-indonesia/> di download pada tanggal 22 Pikul 11.00 WITA.
- Hikmat, Herry. 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- John Friedman, 2014. *Model-model Pembangunan Ekonomi*. UNS.
- Kusnadi, 2012. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Moleong, Lexy J, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- PengertianNelayan. Online.<http://cityofenjie.multiply.com/journal/item/347>.  
(diakses 23 juli 2017 pukul 21.00 WITA)
- PNPM MKP diluncurkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menko Kesra di Kabupaten Konawe Kepulauan Kendari. Online. [www.kp3k.dkp.go.id](http://www.kp3k.dkp.go.id). (diakses 23 juli 2017).
- Sambutan\_menteri\_mkp (pnpn).pdf, di download 28 Desember 2010 pada Pukul 22.00 WIB
- Satria, Arif, 2012. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.

Suharto, Edi. 2013. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2014. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Tim Pengendali (TP) PNPM Mandiri, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2013. *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*.

Tim PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, 2013. *Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan*.

[www.kapanlagi.com/arsip/2008/04/15/pnpm-madiri-kp](http://www.kapanlagi.com/arsip/2008/04/15/pnpm-madiri-kp), diakses pada 21 Juli 2017

pukul 20.00 WITA

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## DOKUMENTASI



Gambar. Masjid Besar Desa Langara Bajo



Gambar. Rumah Warga (Nelayan).



Gambar. Perahu Nelayan



Gambar. Pelabuhan Nelayan



Gambar. Peneliti dan Sekretaris Desa langara Bajo



Gambar. Jalan Antar Desa

## PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek Yang Di amati	Keterangan
1.	Lokasi/Kondisi Geografis	
2	Jumlah Warga Desa Langara Bajo	
3	Mata Pencaharian Warga Masyarakat Desa Langara Bajo	
4	Tingkat Pendidikan Masyarakat	
5	Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Langara Bajo	
6	Faktor-faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat	
7	Dampak Pemberdayaan Masyarakat	

## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA

### I. Identitas Diri

- a. Nama : H
- b. Usia : 45 Tahun
- c. Pendidikan Terakhir : SMA
- d. Jabatan : Pengelola

### II. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda mulai menjadi pengelola Desa Langara Bajo?
2. Pihak mana sajakah yang membantu Desa Langara Bajo?
3. Berasal dari mana sumber dana yang ada di Desa Langara Bajo?
4. Bagaimana Proses Pemberdayaan masyarakat disini?
5. Fasilitas apa sajakah yang ada di Desa Langara Bajo?
6. Apakah ada pelatihan yang diadakan oleh instansi-instansi khusus dalam pemberdayaan masyarakat Desa Langara Bajo?
7. Apa saja faktor pendukung dari pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Langara Bajo?
8. Apa saja dampak dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Langara Bajo?
9. Apakah disini semua masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa langara Bajo?

## **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA**

### **I. Identitas Diri**

- a. Nama : D
- b. Usia : 42 Tahun
- c. Pendidikan Terakhir : S1
- d. Jabatan : Kepala Desa

### **II. Daftar Pertanyaan**

1. Apakah bapak mendukung pembangunan di Desa Langara Bajo?
2. Berasal darimana sumber dana yang ada di Desa Langara Bajo?
3. Perubahan apa saja yang bapak rasakan sebelum dan setelah pembagunan yang dilakukan di Desa Langara Bajo?
4. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Langara Bajo?
5. Apakah masyarakat disini berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan yang ada di Desa Langara Bajo?
6. Apa saja kendala dalam memberdayakan masyarakat di Desa Langara Bajo?
7. Apakah bapak pernah mendengar adanya permasalahan atau konflik di Desa Langara Bajo dalam memberdayakan masyarakat?
8. Bagaimana upaya bapak dalam menyadarkan masyarakat Desa Langara Bajo agar ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat disini?
9. Apa saran bapak untuk masyarakat di Desa Langara Bajo?

# **PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

## **I. Identitas Diri**

- a. Nama : A.A
- b. Usia : 47 Tahun
- c. Pendidikan : S1
- d. Jabatan : Pegawai Dinas

## **II. Daftar Pertanyaan**

1. Apa peran dinas perikanan dan kelautan kabupaten konawe kepulauan untuk di Desa Langara Bajo?
2. Faktor apa saja yang mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Langara Bajo?
3. Apa pendapat bapak mengenai pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Langara Bajo?
4. Apa kontribusi dinas perikanan dan kelautan pada Desa Langara Bajo?
5. Apa dampak pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Langara Bajo?
6. Adakah upaya dari dinas perikanan dan kelautan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Langara Bajo?

## HASIL WAWANCARA DENGAN PENGELOLA

### I. Identitas Diri

- a. Nama : H
- b. Usia : 45 Tahun
- c. Pendidikan Terakhir : SMA
- d. Jabatan : Pengelola

### II. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan anda mulai menjadi pengelola Desa Langara Bajo?

Jawab : *Sejak saya terpilih menjadi ketua PNPM di Desa Langara Bajo.*

2. Pihak mana sajakah yang membantu Desa Langara Bajo?

Jawab : *dari dinas yang ada di kabupaten Konawe Kepulauan misalnya dinas Perikanan dan kelautan, dalam hal ini mereka memberikan bantuan seperti katinting untuk nelayan disini.*

3. Berasal dari mana sumber dana yang ada di Desa Langara Bajo?

Jawab : *sumber dana yang ada dalam mengembangkan desa langara bajo awalnya swadaya masyarakat dek, lalu ada bantuan pemerintah lewat PNPM yakni pernah desa mendapatkan 35 juta untuk pembuatan jalan.*

4. Bagaimana Proses Pemberdayaan masyarakat disini?

Jawab : *Prosesnya berjalan dengan baik dek*

5. Fasilitas apa sajakah yang ada di Desa Langara Bajo?

Jawab : *fasilitas yang ada di desa langara bajo adalah balai desa sebagai pertemuan warga, perahu bantuan dari pemerintah daerah sebanyak 3 unit dan lain-lain dek.*

6. Apakah ada pelatihan yang diadakan oleh instansi-instansi khusus dalam pemberdayaan masyarakat Desa Langara Bajo?

Jawab : *oh ada dek. Dulu pernah ada pelatihan dari balai latihan kerja untuk konawe kepulauan untuk ibu-ibu memasak selama 1 bulan.*

7. Apa saja faktor pendukung dari pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Langara Bajo?

Jawab : *faktor pendukung yang ada adalah adanya semangat kekeluargaan, saling membantu dan jika ada kerja bakti selalunya semua warga berbondong-bondong datang.*

8. Apa saja dampak dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Langara Bajo?

Jawab : *alhamdulillah dampaknya ada yakni kekeluargaan semakin erat dan jiwa membangun setiap keluarga itu semakin nampak.*

9. Apakah disini semua masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa langara Bajo?

Jawab : *semua masyarakat disini berpartisipasi jika ada kerja bakti, biasanya karang taruna selalu jadi pemandu untuk masyarakat.*

## HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA

### I. Identitas Diri

- a. Nama : D
- b. Usia : 42 Tahun
- c. Pendidikan Terakhir : S1
- d. Jabatan : Kepala Desa

### II. Daftar Pertanyaan

1. Apakah bapak mendukung pembangunan di Desa Langara Bajo?

*Jawab :sangat jelas, sebagai pemerintah desa sangat mendukung penuh program pemerintah dari pusat terlebih dari pemerintah kabupaten.*

2. Berasal darimana sumber dana yang ada di Desa Langara Bajo?

*Jawab : sumber dana yang didapatkan yakni dari dana desa, tapi ada juga bantuan dari pemerintah kabupaten tapi berbentuk barang (pukat dan mata pancing) untuk nelayan.*

3. Perubahan apa saja yang bapak rasakan sebelum dan setelah pembangunan yang dilakukan di Desa Langara Bajo?

*Jawab : dulu sangat tertinggal tapi sekarang semenjak adanya dana desa sangat membantu dalam hal pembangunan, misalnya adanya pos ronda dan tempat pertemuan masyarakat (semi permanen).*

4. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Langara Bajo?

*Jawab : alhamdulillah dek kesejahteraannya masyarakat meningkat.*

5. Apakah masyarakat disini berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan yang ada di Desa Langara Bajo?

*Jawab : masyarakat disini sangat antusias dan berperan aktif dalam membantu program pemerintah.*

6. Apa saja kendala dalam memberdayakan masyarakat di Desa Langara Bajo?

*Jawab : kendalanya, masih banyak buta huruf sehingga sangat di mungkinkan adanya miskomunikasi.*

7. Apakah bapak pernah mendengar adanya permasalahan atau konflik di Desa Langara Bajo dalam memberdayakan masyarakat?

*Jawab : alhamdulillah tidak dek.*

8. Bagaimana upaya bapak dalam menyadarkan masyarakat Desa Langara Bajo agar ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat disini?

*Jawab : sebelum melaksanakan program kerja tentunya harus sosialisasi dulu dengan masyarakat agar semua sejalan.*

9. Apa saran bapak untuk masyarakat di Desa Langara Bajo?

*Jawab : saran saya, mengajak masyarakat agar terlibat aktif dalam program-program pemerintah.*

## HASIL WAWANCARA DENGAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

### I. Identitas Diri

- a. Nama : A.A
- b. Usia : 47 Tahun
- c. Pendidikan : S1
- d. Jabatan : Pegawai Dinas

### II. Daftar Pertanyaan

1. Apa peran dinas perikanan dan kelautan kabupaten konawe kepulauan untuk di Desa Langara Bajo?

*Jawab : peran pemerintah dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan memotivasi desa yang mendapat perhatian khusus. Desa langara bajo yang secara mayoritas berpenghasilan di laut sangat di perhatikan oleh pemerintah.*

2. Faktor apa saja yang mendukung pemberdayaan masyarakat di Desa Langara Bajo?

*Jawab : masyarakat langara bajo, sangat berpartisipasi dalam menyambut program pemerintah. Sosial dan budaya masyarakat langara bajo alhamdulillah sangat mendukung dalam pembangunan.*

3. Apa pendapat bapak mengenai pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Langara Bajo?

*Jawab : desa langara bajo harus betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten.*

4. Apa kontribusi dinas perikanan dan kelautan pada Desa Langara Bajo?

*Jawab : kami memberikan bantuan berupa pukat, perahu dan karamba untuk masyarakat langara bajo.*

5. Apa dampak pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Langara Bajo?

*Jawab : dampaknya sangat positif. Pendapatan masyarakat meningkat.*

6. Adakah upaya dari dinas perikanan dan kelautan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Langara Bajo?

*Jawab : untuk ini sangat kami hanya memberikan bantuan bersifat barang.*

*Tapi kami juga akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan.*

## RIWAYAT HIDUP



**Sarmanto**, lahir tanggal 26 Mei 1993 di Desa Mosolo, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Merupakan anak ke 6 dari 9 bersaudara, Putra dari pasangan La Mpiolu dan Wa Saba. Peneliti memasuki jenjang Pendidikan pada tahun 1999 – 2005 kemudian melanjutkan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama di SMP Neg. 2 Waworete (SMP Neg. 1 Wawonii Tenggara- Sekarang) pada tahun 2005 – 2008.

Peneliti menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Neg. 2 Kendari pada tahun 2008 – 2011. Peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Program Strata Satu (S1) sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tahun 2011 – 2018.